



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Maret 2020/Periodik - 2019)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
**UNIT KERJA** : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
**SUB UNIT KERJA** : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : FENTY YUSDAYATI
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 107171

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 3.368.000.000

1. Tanah Seluas 288 m2 di SLEMAN, HIBAH TANPA AKTA Rp. 1.728.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 130 m2/160 m2 di KOTA YOGYAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 1.300.000.000
3. Bangunan Seluas 36 m2 di KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 340.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 128.000.000

1. MOTOR, KAWASAKI NINJA KAWASAKI Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
2. MOBIL, HONDA BRIO SATYA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
3. MOTOR, HONDA HONDA BEAT Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 170.500.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. 60.000.000**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 447.974.021**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---**Sub Total** Rp. 4.174.474.021**III. HUTANG** Rp. ---**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 4.174.474.021

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkn.kpk.go.id](http://elhkn.kpk.go.id).



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **13 April 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.